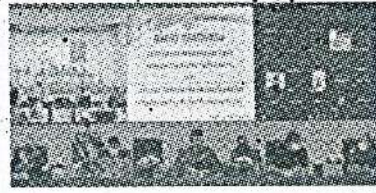
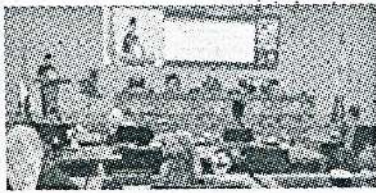




Tampak juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Madiun, Drs. H. Sugeng, SH, M.H membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 di gedung DPRD setempat, Jumat (16/4).

sudarno/bhirawa



Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, SH (tengah) memimpin Sidang Paripurna PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Terhadap Raperda Tentang PP APBD TA 2020 di gedung DPRD setempat Jumat (16/4). Tampak mendampingi Ketua I, II DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya, Wali Kota Madiun, Maldi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS.

sudarno/bhirawa

PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Menyoroti Berbagai Masalah Terhadap Raperda Tentang PP APBD TA 2020

Sidang Paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya serta dihadiri Wali Kota Madiun, Maldi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto serta Forkopimda Kota Madiun di gedung DPRD setempat, Jumat (16/4):

Pemendangan Umum Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara (jubir) nya Drs. Gandhi Hatmoko, M.Si menyatakan, berdasarkan data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemkot Madiun, Tingkat Kemiskinan Penduduk Kota Madiun tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 4,98%, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 4,35%.

Dengan naiknya tingkat kemiskinan penduduk Kota Madiun ini, strategi apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun-tahun berikutnya? Mohon penjelasannya

Terkait Belanja Daerah yang ada pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dari anggaran yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp3,999 milyar lebih hanya terealisasi 54,95%.

Selain itu, jika dicermati dalam Laporan Keuangan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, banyak kegiatan yang tidak terserap contohnya Belanja Jasa EO. Mengapa bisa terjadi demikian? Mohon penjelasannya.

Fraksi Partai Demokrat dengan jubir Drs. H. Sugeng, SH, Mh menyatakan Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun memberikan apresiasi atas dipertahankannya kembali opini WTP atas hasil audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Dengan opini WTP ini menunjukkan bahwa salah satu indikator, pengelolaan keuangan yang baik secara administrasi sudah terpenuhi, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Disisi lain Fraksi Partai Demokrat menyoroti terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap 7,29%, mohon penjelasan upaya apa yang telah dilakukan Pemkot Madiun dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 ini bagi masyarakat? Langkah dan kebijakan apa yang dilekukan untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan utamanya di masa pandemik ini serta upaya apa yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun?

Fraksi Perindo dengan jubir Hari Santoso, ST menyatakan, Fraksi Perindo mengapresiasi atas kerja keras pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan Realisasi Pendapatan daerah tahun 2020 yang melebihi target sebesar Rp69,3 miliar lebih atau terealisasi 107,0% dari target.

Namun demikian hal ini diiringi dengan peningkatan SILPA senilai 21,0% dari dana tersedia yaitu Rp268,933 miliar. Mohon

penjelasan. Beserta langkah langkah konkrit apa yang akan dilakukan eksekutif bersama OPD ke depan, untuk menekan jumlah SILPA agar tidak sebesar tahun 2020? Mohon penjelasan.

Berkaitan dengan meningkatnya angka pengangguran sebanyak 8.195 orang, yaitu meningkat 4.419 orang dari 3.776 di tahun 2019, serta tidak tercapainya target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu 8,32 persen dari target 3,8. Langkah dan inovasi apa yang akan ditempuh Pemkot Madiun untuk mengatasi hal ini? Fraksi Perindo mohon penjelasan.

Fraksi PKB dengan jubir Erlina Susilorini S.Si Apt. MM menyatakan, Fraksi PKB DPRD Kota Madiun perlu mendapatkan jawaban tertulis Wali Kota Madiun atas rincian SILPA sebagai berikut: SILPA hasil efisiensi program dan kegiatan berapa? SILPA direncanakan (BTT) berapa? Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan / belum dilaksanakan berapa? serta dari OPD mana saja dan apa alasannya, mohon penjelasannya?.

Strategi dan arah kebijakan apa, yang baru dari pemerintahan periode 2019 – 2024 untuk memperbaiki performa APBD Kota Madiun agar lebih kredibel, transparan dan akuntabel?.

Dengan kondisi terdampak Covid 19 saat ini, lanjut jubir FPKB, bagaimana Langkah Pemkot terkait dengan penyediaan dana Penanganan dan Recovery Ekonomi akibat dampak Covid 19 tersebut?.

Catatan: Dalam sistem pengendalian internal Pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun tahun 2020, BPK Provinsi Jawa Timur dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Madiun tahun 2020, masih menemukan kelemahan pada sistem pengendalian internal (SPI) yang mengakibatkan pendapatan dan belanja daerah belum memadai.

Fraksi PKB DPRD Kota Madiun menyarankan agar hasil rekomendasi BPK ini dapatnya dimasukkan dalam materi ranperda pertanggungjawaban APBD 2020.

Fraksi PKS-PAN dengan jubir Drg. Indah Sat Rachmaniaty menyatakan, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pemasukan PAD murni khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan BPHTB, perlu ada penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak.

Permasalahan BHPTB menjadi hal yang menarik dalam pembahasan Pendapatan Asli Daerah kota Madiun. Untuk itu, Fraksi PKS-PAN meminta penjelasan kepada Pemkot Madiun, apa strategi Pemerintah Kota

Madiun dalam mewujudkan maksimalisasi pendapatan dari sumber tersebut dan meminimalisir dinamika dalam hal tersebut. Mohon tanggapannya!

Fraksi PKS-PAN juga menyorot atas pertumbuhan nilai aset tetap tahun 2020 yang mengalami kenaikan yg tidak terlalu signifikan patut memperoleh perhatian dari Pemkot Madiun. Berdasarkan tabel diatas, total jumlah Aset yang dimiliki tahun 2020 tercatat sekitar Rp2,158 triliun, dibandingkan dengan penyerapan belanja modal, serta belanja barang, dan jasa yg setiap tahun rata-rata mencapai Rp500 milyar. Untuk itu apakah Pemerintah kota Madiun akan melakukan re-evaluasi nilai untuk aset tetap? Mohon tanggapannya!

Fraksi Partai Gerindra jubir Rina Haryati, ST. MM menyatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditian Rakyat Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.361.944.488,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05 atau terjadi penurunan sebesar Rp759.791.879,05 atau 35,81%

Selain itu juga selama tahun 2020 informasi mengenai kredit macet juga beredar di media masa, sehingga perlu penanganan dalam strategi bisnis PD.

BPR Bank Daerah. Jiki demikian, apakah sudah ada rancangan dan strategi bisnis yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman yang serba cepat ini? Mohon dipaparkan rancangan dan strategi bisnis PD BPR Bank Daerah. Kemudian bagaimana solusi terkait kredit macet?.

Fraksi Madiun Bermartabat (Mantap) dengan jubir, Tutik Endang Sri Wahyuni menyatakan, Fraksi Mantap mengapresiasi gagasan Pemkot Madiun dengan pembangunan lapak UMKM di tiap Kelurahan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19.

Namun ada hal yang ingin kami tanyakan, Apakah Pemkot Madiun sudah melakukan perencanaan secara konsep, dan mengevaluasi Lapak UMKM yang sudah berjalan atau beroperasi, sehingga tujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat bisa tercapai.

Fraksi Mantap, juga melihat Besaran SILPA yang meningkat dari tahun 2019, yaitu sebesar 21 persen, kami melihat banyaknya Biaya Tidak Terduga dan Dana Hibah serta Bansos yang tidak terserap secara maksimal.

Apa langkah ke depan dari Pemkot Madiun dalam memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut sehingga bisa membantu memulihkan ekonomi dan kesejahteraan sosial. [dar.adv]